



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 5

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6224);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
37. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57);
38. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 02);
39. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 61);
40. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);

41. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 10);
44. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 7);
45. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 5);

46. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 18);
47. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Melalui Penambahan Modal Saham Pemerintah Kota Depok kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Melalui Penambahan Modal Saham Pemerintah Kota Depok kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 19);
48. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);
49. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
50. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 9);
51. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp3.236.277.806.392,00
b. Belanja	<u>Rp3.231.267.376.079,00</u>
Surplus	Rp5.010.430.313,00
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp765.645.486.751,55
2. Pengeluaran	<u>Rp100.000.000.000,00</u>
3. Pembiayaan Bersih	Rp665.645.486.751,55

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp3.121.095.250.056,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp3.236.277.806.392,00</u> |
| Selisih Lebih | Rp15.182.556.336,00 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja adalah sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp3.786.740.736.807,55 |
| 2. Realisasi | <u>Rp3.231.267.376.079,00</u> |
| Selisih Lebih | Rp555.473.360.728,55 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit), adalah sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Anggaran Defisit setelah perubahan | (Rp665.645.486.751,55) |
| 2. Realisasi | <u>Rp5.010.430.313,00</u> |
| Selisih Lebih | Rp670.655.917.064,55 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp765.645.486.751,55 |
| 2. Realisasi | <u>Rp765.645.486.751,55</u> |
| Selisih Lebih | Rp0,00 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp100.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp100.000.000.000,00</u> |
| Selisih Lebih | Rp0,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto adalah sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp665.645.486.751,55 |
| 2. Realisasi | <u>Rp665.645.486.751,55</u> |
| Selisih Lebih | Rp0,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp765.645.486.751,55
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp765.645.486.751,55
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp670.655.917.064,55
d. Koreksi Tahun Sebelumnya	Rp0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp670.655.917.064,55

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp12.066.798.550.548,30
b. Jumlah Kewajiban	Rp47.478.784.881,46
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp12.019.319.765.666,80

Pasal 6

Laporan Operasional Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp4.564.321.036.119,81
b. Beban	<u>Rp2.880.213.481.843,76</u>
Surplus/Defisit Operasional	Rp1.684.107.554.276,05
c. Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp32.719.378.637,32
d. Pos luar Biasa	<u>Rp168.162.500,00</u>
Surplus/Defisit LO	Rp1.716.658.770.413,37

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2019	Rp765.647.579.351,55
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp931.099.804.639,00
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(Rp1.026.089.374.326,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp0,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(Rp2.092.600,00)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2019	Rp670.655.917.064,55

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp10.171.223.327.937,90
b. Surplus/Defisit-LO	Rp1.716.658.770.413,37
Sub Total	Rp11.887.882.098.351,20
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
1. Koreksi Piutang Pajak	(Rp3.292.722.359,00)
2. Koreksi Aset Tetap	Rp140.830.510.561,94
3. Koreksi Penyusutan	(Rp6.345.419.245,95)
4. Koreksi Utang Belanj	Rp326.182.224,00
5. Koreksi Ekuitas Lainnya	(Rp81.182.865,40)
Sub Total	Rp131.437.667.315,59
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp12.019.319.765.666,80

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
 2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara.
- b. Lampiran II : Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih.

- c. Lampiran III : Laporan Operasional.
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas.
- e. Lampiran V : Neraca.
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas.
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak tertagih.
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir.
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap daerah.
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan.
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah.
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek.
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang.
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum Diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan Keuangan Badan usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 November 2020
Pjs. WALI KOTA DEPOK,

TTD

DEDI SUPANDI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(5/128/2020)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005



Lampiran I
 Nomor : 5 TAHUN 2020
 Tanggal : 3 November 2020

PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (Audited)
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REF	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
1	PENDAPATAN	G.5.1.1				
2						
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	G.5.1.1.1				
4	Pendapatan Pajak Daerah	G.5.1.1.1.1	911.161.768.399,00	1.018.129.612.075,00	111,74	839.491.835.275,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	G.5.1.1.1.2	41.304.430.901,00	40.835.247.582,00	98,86	36.388.197.243,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	G.5.1.1.1.3	13.453.680.609,00	21.701.132.428,00	161,30	12.681.414.156,00
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	G.5.1.1.1.4	172.579.774.802,00	212.337.776.952,00	123,04	171.138.834.019,72
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1.138.499.654.711,00	1.293.003.769.037,00	113,57	1.059.700.280.693,72
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER	G.5.1.1.2				
11	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	G.5.1.1.2.1				
12	Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.1.1	88.028.088.000,00	59.334.129.615,00	67,40	78.494.670.284,00
13	Bagi Sumber Daya Alam	G.5.1.1.2.1.2	27.816.418.000,00	24.159.177.895,00	86,85	23.969.468.586,00
14	Dana Alokasi Umum	G.5.1.1.2.1.3	950.369.136.000,00	950.369.136.000,00	100,00	860.675.991.000,00
15	Dana Alokasi Khusus	G.5.1.1.2.1.4	199.275.642.447,00	193.686.735.455,00	97,20	195.519.453.727,00
16	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		1.265.489.284.447,00	1.227.549.178.965,00	97,00	1.158.659.583.597,00
17	Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	G.5.1.1.2.2				
18	Dana Penyesuaian	G.5.1.1.2.2.1	20.465.336.000,00	10.232.668.000,00	50,00	78.250.000.000,00
19	Jumlah Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya		20.465.336.000,00	10.232.668.000,00	50,00	78.250.000.000,00
20	Transfer Pemerintah Provinsi	G.5.1.1.2.3				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.3.1	513.042.158.098,00	521.083.965.142,00	101,57	478.502.251.409,00
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		513.042.158.098,00	521.083.965.142,00	101,57	478.502.251.409,00
23	Jumlah Pendapatan Transfer		1.798.996.778.545,00	1.758.865.812.107,00	97,77	1.715.411.835.006,00
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	G.5.1.1.3				
25	Pendapatan Hibah	G.5.1.1.3.1	124.080.200.000,00	125.715.328.821,00	101,32	123.280.664.379,00
26	Pendapatan Lainnya	G.5.1.1.3.2	59.518.616.800,00	58.692.896.427,00	98,61	41.873.707.000,00
27	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		183.598.816.800,00	184.408.225.248,00	100,44	165.154.371.379,00
28						
29	JUMLAH PENDAPATAN		3.121.095.250.056,00	3.236.277.806.392,00	103,69	2.940.266.487.078,72
30						
31	BELANJA	G.5.1.2				
32						
33	BELANJA OPERASI	G.5.1.2.1				
34	Belanja Pegawai	G.5.1.2.1.1	1.500.171.864.900,00	1.340.183.748.820,00	89,34	1.208.917.104.596,00
35	Belanja Barang dan Jasa	G.5.1.2.1.2	933.459.189.272,00	808.848.131.967,00	86,65	667.414.873.943,00
36	Belanja Bunga		-	-		-
37	Belanja Subsidi		-	-		-
38	Belanja Hibah	G.5.1.2.1.3	134.034.962.850,00	110.781.723.850,00	82,65	76.046.094.500,00
39	Belanja Bantuan Sosial	G.5.1.2.1.4	59.261.454.500,00	43.816.998.700,00	73,94	41.311.378.500,00
40	Belanja Bantuan Keuangan	G.5.1.2.1.5	1.379.236.616,00	1.379.235.916,00	100,00	1.171.491.250,00
41	Jumlah Belanja Operasi		2.628.306.708.138,00	2.305.009.839.253,00	87,70	1.994.860.942.789,00
42						
43	BELANJA MODAL	G.5.1.2.2				
44	Belanja Tanah	G.5.1.2.2.1	110.988.202.000,00	96.852.947.280,00	87,26	43.784.742.200,00
45	Belanja Peralatan dan mesin	G.5.1.2.2.2	142.492.387.424,00	133.260.162.515,00	93,52	142.371.807.419,60
46	Belanja Gedung dan Bangunan	G.5.1.2.2.3	383.680.156.375,00	323.537.239.086,00	84,32	187.998.590.951,55
47	Belanja Jalan, irigasi dan jaringan	G.5.1.2.2.4	380.564.990.177,00	336.932.318.556,00	88,53	352.608.471.480,00
48	Belanja Aset Tetap lainnya	G.5.1.2.2.5	43.741.313.538,00	35.506.706.889,00	81,17	43.290.181.148,00
49	Jumlah Belanja Modal		1.061.467.049.514,00	926.089.374.326,00	87,25	770.053.793.199,15
50						
51	BELANJA TAK TERDUGA	G.5.1.2.3				
52	Belanja Tak Terduga	G.5.1.2.3.1	96.966.979.155,55	168.162.500,00	0,17	169.171.831,00
53	Jumlah Belanja Tak Terduga		96.966.979.155,55	168.162.500,00	0,17	169.171.831,00
54						
55	JUMLAH BELANJA		3.786.740.736.807,55	3.231.267.376.079,00	85,33	2.765.083.907.819,15
56	SURPLUS/(DEFISIT)	G.5.1.3	(665.645.486.751,55)	5.010.430.313,00	(0,75)	175.182.579.259,57

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REF	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
57						
58	PEMBIAYAAN	G.5.1.4				
59						
60	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	G.5.1.4.1				
61	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	G.5.1.4.1.1	765.645.486.751,55	765.645.486.751,55	100,00	719.099.559.520,98
62	Pencairan Dana Cadangan		-	-		
63	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-		
64	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-		
65	Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah		-	-		
66	Penerimaan piutang daerah		-	-		
67	Jumlah Penerimaan		765.645.486.751,55	765.645.486.751,55	100,00	719.099.559.520,98
68						
69	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	G.5.1.4.2				
70	Pembentukan Dana Cadangan		-	-		
71	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	G.5.1.4.2.1	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	128.636.652.029,00
72	Pembayaran Pokok Utang		-	-		
73	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-		
74	Jumlah Pengeluaran		100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	128.636.652.029,00
75	PEMBIAYAAN NETO	G.5.1.4.3	665.645.486.751,55	665.645.486.751,55	100,00	590.462.907.491,98
76	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	G.5.1.5	-	670.655.917.064,55		765.645.486.751,55

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Pjs. **WALI KOTA DEPOK**

TTD

DEDI SUPANDI

PEMERINTAH KOTA DEPOK

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2019

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan		Belanja																													
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)																Realisasi (Rp)												Bertambah/berkurang	
				Bertambah/ (Berkurang)	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan	Belanja Bagi Hasil	Bel. Bantuan	Belanja tidak Terduga	Jumlah Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan	Belanja Bagi Hasil	Bel. Bantuan	Belanja tidak Terduga	Jumlah Belanja							
																											Rp	%	Rp	%			
1	2	3	4	5 (4-3)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 7+s.d+16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28 18+s.d+27	29 (28-17)	30				
1.	URUSAN WAJIB	156.044.425.025,00	166.218.700.568,00	10.174.275.543,00		1.121.415.879.831,00	719.545.324.273,00	1.037.862.460.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878.823.664.854,00	1.008.103.071.193,00	618.583.574.318,00	905.405.590.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.092.236.100,00	346.731.428.754,00					
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	121.721.010.910,00	131.985.322.928,00	10.264.312.018,00		867.246.357.056,00	531.630.265.993,00	961.020.552.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.897.175.053,00	781.498.247.752,00	449.630.900.266,00	842.443.021.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.572.169.159,00	286.325.005.894,00					
1.01.01.	PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00		581.290.683.988,00	133.471.995.900,00	82.345.578.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.108.258.088,00	524.637.102.111,00	130.249.601.702,00	78.925.412.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.812.116.771,00	63.296.141.317,00					
1.01.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	0,00	0,00	0,00		581.290.683.988,00	133.471.995.900,00	82.345.578.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.108.258.088,00	524.637.102.111,00	130.249.601.702,00	78.925.412.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.812.116.771,00	63.296.141.317,00					
1.01.02.	KESEHATAN	120.484.270.910,00	130.714.393.928,00	10.230.123.018,00		170.479.570.272,00	291.113.567.797,00	51.043.151.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.636.289.403,00	154.097.925.664,00	231.399.023.486,00	44.187.771.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.684.720.277,00	82.951.569.126,00					

1	2	3	4	5 (4-3)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 7+s.d+16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28 18+s.d+27	29 (28-17)	30
5.01.01.07.	KECAMATAN TAPOS	0,00	136.508,00	136.508,00		15.276.081.125,00	4.491.807.500,00	505.258.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.273.146.725,00	13.766.117.197,00	3.618.328.520,00	462.706.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.847.151.817,00	2.425.994.908,00		
5.01.01.08.	KECAMATAN CINERE	0,00	0,00	0,00		9.896.605.237,00	4.135.556.000,00	186.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.217.840.237,00	9.117.108.604,00	4.064.370.052,00	174.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.355.538.656,00	862.301.581,00		
5.01.01.09.	KECAMATAN CIPAYUNG	0,00	0,00	0,00		13.497.111.951,00	4.912.245.621,00	492.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.901.918.572,00	12.166.974.907,00	4.422.501.329,00	489.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.078.641.236,00	1.823.277.336,00		
5.01.01.10.	KECAMATAN BOJONGSARI	0,00	0,00	0,00		15.725.113.306,00	4.959.168.392,00	404.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.088.678.698,00	13.960.952.741,00	4.664.993.021,00	399.034.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.024.980.162,00	2.063.698.536,00		
5.01.01.11.	KECAMATAN CILODONG	0,00	0,00	0,00		12.464.513.450,00	3.789.005.500,00	189.841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.423.359.950,00	11.320.638.855,00	3.111.837.127,00	148.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.581.036.982,00	1.842.322.968,00		
5.01.01.12.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00		4.307.610.692,00	3.421.743.300,00	107.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837.238.992,00	3.668.675.113,00	3.312.312.534,00	105.557.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086.545.447,00	750.693.545,00		
	Jumlah	3.121.095.250.056,00	3.236.277.806.392,00	115.182.556.336,00		1.500.171.864.900,00	933.459.189.272,00	1.061.467.049.514,00	0,00	0,00	134.034.962.850,00	59.261.454.500,00	0,00	1.379.236.616,00	96.966.979.155,55	3.786.740.736.807,55	1.340.183.748.820,00	808.848.131.967,00	926.089.374.326,00	0,00	0,00	110.781.723.850,00	43.816.998.700,00	0,00	1.379.235.916,00	168.162.500,00	3.231.267.376.079,00	555.473.360.728,55	

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.01. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	797.108.258.088,00	733.812.116.771,00	(63.296.141.317,00)	92,05	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	487.782.079.988,00	438.538.316.766,00	(49.243.763.222,00)	89,90	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	487.782.079.988,00	438.538.316.766,00	(49.243.763.222,00)	89,90	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	309.326.178.100,00	295.273.800.005,00	(14.052.378.095,00)	95,45	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	93.508.604.000,00	86.098.785.345,00	(7.409.818.655,00)	92,07	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	133.471.995.900,00	130.249.601.702,00	(3.222.394.198,00)	97,58	
1.01.1.01.01.01.00.00.5.2.3	BELANJA MODAL	82.345.578.200,00	78.925.412.958,00	(3.420.165.242,00)	95,84	
1.01.01.1.01.01.001.	PENINGKATAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.064.007.800,00	2.024.881.283,00	(39.126.517,00)	98,10	
1.01.01.1.01.01.001.03	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	220.930.000,00	219.788.000,00	(1.142.000,00)	99,48	
1.01.01.1.01.01.001.035.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.930.000,00	219.788.000,00	(1.142.000,00)	99,48	
1.01.01.1.01.01.001.04	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	182.959.800,00	153.083.000,00	(29.876.800,00)	83,67	
1.01.01.1.01.01.001.045.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.959.800,00	153.083.000,00	(29.876.800,00)	83,67	
1.01.01.1.01.01.001.05	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.991.000,00	14.991.000,00	-	100,00	
1.01.01.1.01.01.001.055.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.991.000,00	14.991.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5.01.01.5.01.01.126.01.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	-	100,00	
5.01.01.5.01.01.126.03.	DIALOG PUBLIK PERAN TOKOH AGAMA DALAM KESATUAB BANGSA	69.999.000,00	67.599.000,00	(2.400.000,00)	96,57	
5.01.01.5.01.01.126.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
5.01.01.5.01.01.126.03.5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.999.000,00	57.599.000,00	(2.400.000,00)	95,99	
	JUMLAH BELANJA	7.837.238.992,00	7.086.545.447,00	(750.693.545,00)	90,42	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(7.837.238.992,00)	(7.086.545.447,00)	750.693.545,00	90,42	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(7.837.238.992,00)	(7.086.545.447,00)	750.693.545,00	90,42	

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI

PEMERINTAH KOTA DEPOK
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1.	URUSAN WAJIB	308.046.816.434,00	712.731.128.673,00	1.035.351.558.350,00	2.056.129.503.457,00	283.501.161.632,00	612.412.645.950,00	904.208.933.302,00	1.800.122.740.884,00	256.006.762.573,00	87,55
1.01.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	188.124.367.434,00	531.197.315.993,00	850.032.350.004,00	1.569.354.033.431,00	170.428.046.937,00	449.276.366.066,00	745.590.073.861,00	1.365.294.486.864,00	204.059.546.567,00	87,00
1.01.01.	PENDIDIKAN	93.508.604.000,00	133.471.995.900,00	82.345.578.200,00	309.326.178.100,00	86.098.785.345,00	130.249.601.702,00	78.925.412.958,00	295.273.800.005,00	14.052.378.095,00	95,46
1.01.01.1.01 .01.01.	DINAS PENDIDIKAN	93.508.604.000,00	133.471.995.900,00	82.345.578.200,00	309.326.178.100,00	86.098.785.345,00	130.249.601.702,00	78.925.412.958,00	295.273.800.005,00	14.052.378.095,00	95,46
1.01.01.1.01 .01.01.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	30.000.000,00	2.016.510.800,00	17.497.000,00	2.064.007.800,00	30.000.000,00	1.977.384.283,00	17.497.000,00	2.024.881.283,00	39.126.517,00	98,10
1.01.01.1.01 .01.01.001.0 3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	220.930.000,00	-	220.930.000,00	-	219.788.000,00	-	219.788.000,00	1.142.000,00	99,48
1.01.01.1.01 .01.01.001.0 4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	182.959.800,00	-	182.959.800,00	-	153.083.000,00	-	153.083.000,00	29.876.800,00	83,67
1.01.01.1.01 .01.01.001.0 5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	14.991.000,00	-	14.991.000,00	-	14.991.000,00	-	14.991.000,00	-	100,00
1.01.01.1.01 .01.01.001.0 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	7.500.000,00	17.497.000,00	24.997.000,00	-	7.500.000,00	17.497.000,00	24.997.000,00	-	100,00
1.01.01.1.01 .01.01.001.0 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	444.441.000,00	-	444.441.000,00	-	436.516.000,00	-	436.516.000,00	7.925.000,00	98,22

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan				Realisasi				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
Jumlah		351.989.607.432,00	933.459.189.272,00	1.061.467.049.514,00	2.346.915.846.218,00	324.724.098.626,00	808.848.131.967,00	926.089.374.326,00	2.059.661.604.919,00	287.254.241.299,00	87,76

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI

PEMERINTAH KOTA DEPOK

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK

KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
				Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=4-3	6
01.	Pelayanan Umum	286.251.293.661,00	258.054.304.879,00	(28.196.988.782,00)	90,15
01.1.02.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26.544.302.200,00	25.227.597.881,00	(1.316.704.319,00)	95,04
01.1.02.14.	STATISTIK	1.205.630.000,00	1.138.105.400,00	(67.524.600,00)	94,40
01.1.02.15.	PERSANDIAN	206.350.000,00	200.551.250,00	(5.798.750,00)	97,19
01.1.02.18.	KEARSIPAN	2.933.609.500,00	2.760.137.982,00	(173.471.518,00)	94,09
01.3.01.01.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	41.905.099.088,00	35.831.529.539,00	(6.073.569.549,00)	85,51
01.4.01.01.	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	127.228.642.701,00	114.083.652.972,00	(13.144.989.729,00)	89,67
01.5.01.01.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	86.227.660.172,00	78.812.729.855,00	(7.414.930.317,00)	91,40
03.	Ketertiban dan ketentraman	40.842.785.950,00	38.068.095.727,00	(2.774.690.223,00)	93,21
03.1.01.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	40.842.785.950,00	38.068.095.727,00	(2.774.690.223,00)	93,21
04.	Ekonomi	133.102.445.800,00	122.043.028.997,00	(11.059.416.803,00)	91,69
04.1.02.01.	TENAGA KERJA	6.500.351.900,00	6.040.095.660,00	(460.256.240,00)	92,92
04.1.02.03.	PANGAN	2.303.781.900,00	2.174.328.134,00	(129.453.766,00)	94,38
04.1.02.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.322.614.500,00	13.754.872.000,00	(567.742.500,00)	96,04
04.1.02.09.	PERHUBUNGAN	64.620.804.900,00	60.492.597.898,00	(4.128.207.002,00)	93,61
04.1.02.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.383.894.000,00	6.830.655.891,00	(553.238.109,00)	92,51
04.1.02.12.	PENANAMAN MODAL	4.572.057.800,00	3.934.389.342,00	(637.668.458,00)	86,05
04.2.01.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.676.938.000,00	1.922.858.166,00	(754.079.834,00)	71,83
04.2.01.03.	PERTANIAN	6.856.691.000,00	5.598.484.843,00	(1.258.206.157,00)	81,65
04.2.01.06.	PERDAGANGAN	21.180.536.000,00	18.757.189.903,00	(2.423.346.097,00)	88,56
04.2.01.07.	PERINDUSTRIAN	2.550.651.800,00	2.410.908.360,00	(139.743.440,00)	94,52
04.2.01.08.	TRANSMIGRASI	134.124.000,00	126.648.800,00	(7.475.200,00)	94,43
05.	Lingkungan Hidup	300.071.345.400,00	261.398.433.113,00	(38.672.912.287,00)	87,11
05.1.02.04.	PERTANAHAN	111.443.600.000,00	97.229.929.480,00	(14.213.670.520,00)	87,25
05.1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP	188.627.745.400,00	164.168.503.633,00	(24.459.241.767,00)	87,03
06.	Perumahan dan fasilitas umum	820.584.533.916,00	708.005.567.682,00	(112.578.966.234,00)	86,28
06.1.01.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	437.288.334.691,00	386.659.807.669,00	(50.628.527.022,00)	88,42
06.1.01.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	383.296.199.225,00	321.345.760.013,00	(61.950.439.212,00)	83,84
07.	Kesehatan	409.131.517.465,00	333.400.693.273,00	(75.730.824.192,00)	81,49
07.1.01.02.	KESEHATAN	391.715.936.565,00	317.654.483.096,00	(74.061.453.469,00)	81,09

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
				Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5=4-3	6
07.1.02.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	17.415.580.900,00	15.746.210.177,00	(1.669.370.723,00)	90,41
08.	Pariwisata dan Budaya	5.853.600.000,00	5.632.027.197,00	(221.572.803,00)	96,21
08.1.02.16.	KEBUDAYAAN	3.827.600.000,00	3.637.165.600,00	(190.434.400,00)	95,02
08.2.01.02.	PARIWISATA	2.026.000.000,00	1.994.861.597,00	(31.138.403,00)	98,46
10.	Pendidikan	321.514.537.326,00	306.045.467.435,00	(15.469.069.891,00)	95,19
10.1.01.01.	PENDIDIKAN	309.326.178.100,00	295.273.800.005,00	(14.052.378.095,00)	95,46
10.1.02.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	9.762.019.226,00	8.431.309.589,00	(1.330.709.637,00)	86,37
10.1.02.17.	PERPUSTAKAAN	2.426.340.000,00	2.340.357.841,00	(85.982.159,00)	96,46
11.	Perlindungan Sosial	29.563.786.700,00	27.013.986.616,00	(2.549.800.084,00)	91,38
11.1.01.06.	SOSIAL	6.884.598.900,00	6.292.540.354,00	(592.058.546,00)	91,40
11.1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.300.840.900,00	7.868.729.546,00	(432.111.354,00)	94,79
11.1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.378.346.900,00	12.852.716.716,00	(1.525.630.184,00)	89,39
JUMLAH		2.346.915.846.218,00	2.059.661.604.919,00	(287.254.241.299,00)	

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI



PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (Audited)
 Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REF	2019	2018
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	G.5.2.1	765.645.486.751,55	719.099.559.520,98
2	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	G.5.2.2	(765.645.486.751,55)	(719.099.559.520,98)
3	Sub Total		-	-
4				
5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	G.5.2.3	670.655.917.064,55	765.645.486.751,55
6	Sub Total		670.655.917.064,55	765.645.486.751,55
7				
8	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
9	Lain-Lain		-	-
10	Saldo Anggaran Lebih	G.5.2.4	670.655.917.064,55	765.645.486.751,55

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Pjs. **WALI KOTA DEPOK**

TTD

DEDI SUPANDI



Lampiran III
 Nomor : 5 TAHUN 2020
 Tanggal : 3 November 2020

PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN OPERASIONAL (Audited)
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REF	2019	2018
1	KEGIATAN OPERASIONAL	G.5.4.1		
2	PENDAPATAN	G.5.4.1.1		
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH	G.5.4.1.1.1		
4	Pendapatan Pajak Daerah	G.5.4.1.1.1.1	1.138.174.802.114,95	954.161.955.880,27
5	Pendapatan Retribusi Daerah	G.5.4.1.1.1.2	45.634.608.926,56	35.735.814.586,49
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	G.5.4.1.1.1.3	21.701.132.428,00	12.681.414.156,00
7	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	G.5.4.1.1.1.4	205.583.155.002,89	181.100.706.409,72
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1.411.093.698.472,40	1.183.679.891.032,48
9				
10	PENDAPATAN TRANSFER	G.5.4.1.1.2		
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	G.5.4.1.1.2.1		
12	Dana Bagi Hasil Pajak	G.5.4.1.1.2.1.1	59.334.129.615,00	78.494.670.284,00
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	G.5.4.1.1.2.1.2	24.159.177.895,00	23.969.468.586,00
14	Dana Alokasi Umum	G.5.4.1.1.2.1.3	950.369.136.000,00	860.675.991.000,00
15	Dana Alokasi Khusus	G.5.4.1.1.2.1.4	193.686.735.455,00	195.519.453.727,00
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.227.549.178.965,00	1.158.659.583.597,00
17				
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	G.5.4.1.1.2.2		
19	Dana Penyesuaian	G.5.4.1.1.2.2.1	10.232.668.000,00	78.250.000.000,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		10.232.668.000,00	78.250.000.000,00
21				
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	G.5.4.1.1.2.3		
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.4.1.1.2.3.1	521.246.509.095,00	478.315.470.120,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer Provinsi		521.246.509.095,00	478.315.470.120,00
25				
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	G.5.4.1.1.3		
27	Pendapatan Hibah	G.5.4.1.1.3.1	1.335.506.085.160,41	500.659.204.340,00
28	Pendapatan Lainnya	G.5.4.1.1.3.2	58.692.896.427,00	41.873.707.000,10
29	Jumlah Pendapatan Lain-Lain Yang Sah		1.394.198.981.587,41	542.532.911.340,10
30				
31	JUMLAH PENDAPATAN		4.564.321.036.119,81	3.441.437.856.089,58
32				
33	BEBAN	G.5.4.1.2		
34	Beban Pegawai	G.5.4.1.2.1	1.337.484.279.684,32	1.209.814.239.957,71
35	Beban Persediaan	G.5.4.1.2.2	120.134.620.583,80	130.118.493.550,54
36	Beban Jasa	G.5.4.1.2.3	570.187.595.621,04	460.871.176.775,69
37	Beban Pemeliharaan	G.5.4.1.2.4	41.376.068.576,00	26.293.576.596,00
38	Beban Perjalanan Dinas	G.5.4.1.2.5	58.981.613.114,00	41.915.871.207,00
39	Beban Bunga		-	-
39	Beban Subsidi		-	-
40	Beban Hibah	G.5.4.1.2.6	125.048.691.955,83	191.421.183.897,37
41	Beban Bantuan Sosial	G.5.4.1.2.7	43.901.883.300,00	41.311.835.900,00
42	Beban Penyusutan & Amortisasi	G.5.4.1.2.8	519.115.158.008,00	433.708.024.621,37
43	Beban Penyisihan	G.5.4.1.2.9	54.789.917.011,77	(40.923.294.967,59)
44	Beban Transfer	G.5.4.1.2.10	1.379.235.916,00	1.171.491.250,00
45	Beban Lain-Lain	G.5.4.1.2.11	7.814.418.073,00	6.091.387.924,00
46	JUMLAH BEBAN		2.880.213.481.843,76	2.501.793.986.712,10
47				
48	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		1.684.107.554.276,05	939.643.869.377,49

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REF	2019	2018
49				
50	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
51	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	G.5.4.2.1	32.719.378.637,32	14.920.859.084,88
52	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional		32.719.378.637,32	14.920.859.084,88
53				
54	POS LUAR BIASA	G.5.4.3		
55	Pendapatan Luar Biasa		-	-
56	Beban Luar Biasa	G.5.4.3.1	168.162.500,00	169.171.831,00
57	Jumlah Pos Luar Biasa		168.162.500,00	169.171.831,00
58				
	SURPLUS/DEFISIT LO	G.5.4.4	1.716.658.770.413,37	954.395.556.631,37

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Pjs. **WALI KOTA DEPOK**

TTD

DEDI SUPANDI



PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Audited)
UNTUK TAHUN 2019 DAN 2018

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018
1	2	3
Ekuitas Awal	10.171.223.327.937,90	9.296.616.670.275,05
Surplus/Defisit - LO	1.716.658.770.413,37	954.395.556.631,37
Sub Total	11.887.882.098.351,20	10.251.012.226.906,40
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
Koreksi Piutang Pajak	(3.292.722.359,00)	(97.902.427.013,00)
Koreksi Aset Tetap	140.830.510.561,94	12.811.911.890,40
Koreksi Penyusutan	(6.345.419.245,95)	6.131.563.510,53
Koreksi Utang Belanja	326.481.224,00	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	(81.182.865,40)	(829.947.356,50)
Sub Total	131.437.667.315,59	(79.788.898.968,57)
Jumlah Ekuitas Akhir	12.019.319.765.666,80	10.171.223.327.937,90

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI



PEMERINTAH KOTA DEPOK
NERACA (Audited)
Per 31 Desember 2019 dan 2018

Lampiran V
 Nomor : 5 TAHUN 2020
 Tanggal : 3 November 2020

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2019	2018
1	ASET	G.5.3.1		
2				
3	ASET LANCAR	G.5.3.1.1		
4	Kas di Kas Daerah	G.5.3.1.1.1	632.702.881.248,55	290.241.510.246,55
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	G.5.3.1.1.2	23.173.498,00	400.394.130,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan	G.5.3.1.1.3	21.967.400,00	4.075.500,00
7	Kas di BLUD	G.5.3.1.1.4	32.265.015.809,00	44.888.880.585,00
8	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	G.5.3.1.1.5	576.872,00	4.467.813,00
9	Kas Lainnya	G.5.3.1.1.6	5.642.302.237,00	108.251.077,00
10	Setara Kas	G.5.3.1.1.7	-	430.000.000.000,00
11	Piutang Pajak	G.5.3.1.1.8	696.644.044.719,95	575.695.301.021,95
12	Penyisihan Piutang Pajak	G.5.3.1.1.8.1	(199.191.314.791,87)	(144.398.623.419,89)
13	Piutang Pajak Neto	G.5.3.1.1.8.2	497.452.729.928,08	431.296.677.602,06
14	Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.9	5.137.287.800,00	144.935.200,00
15	Penyisihan Piutang Retribusi	G.5.3.1.1.9.1	(35.047.568,00)	(9.436.917,00)
16	Piutang Retribusi Neto	G.5.3.1.1.9.2	5.102.240.232,00	135.498.283,00
17	Belanja dibayar Dimuka	G.5.3.1.1.10	498.186.372,46	384.010.461,23
18	Piutang Dana Bagi Hasil	G.5.3.1.1.11	-	-
19	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	G.5.3.1.1.11.1	-	-
20	Piutang Dana Bagi Hasil Neto	G.5.3.1.1.11.2	-	-
21	Piutang Transfer Pemerintah Propinsi	G.5.3.1.1.12	23.942.358.201,00	23.779.814.248,00
22	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Propinsi	G.5.3.1.1.12.1	(119.711.791,01)	(118.899.071,24)
23	Piutang Dana Bagi Hasil Neto	G.5.3.1.1.12.2	23.822.646.409,99	23.660.915.176,76
24	Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.14	20.618.978.551,00	26.290.440.646,00
25	Penyisihan Piutang Lainnya	G.5.3.1.1.11.1	(261.012.331,07)	(290.210.062,05)
26	Piutang Lainnya Neto	G.5.3.1.1.11.2	20.357.966.219,93	26.000.230.583,95
27	Persediaan	G.5.3.1.1.12	41.313.710.581,21	36.733.168.783,17
28	Jumlah Aset Lancar		1.259.203.396.808,22	1.283.858.080.241,72
29				
30	INVESTASI JANGKA PANJANG	G.5.3.1.2		
31	Investasi Non Permanen	G.5.3.1.2.1	-	-
32	Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
33	Jumlah Investasi Non Permanen		-	-
34	Investasi Permanen	G.5.3.1.2.2	-	-
35	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	G.5.3.1.2.2.1	613.560.766.214,00	480.841.387.576,68
36	Investasi Permanen Lainnya		-	-
37	Jumlah Investasi Permanen		613.560.766.214,00	480.841.387.576,68
38	Jumlah Investasi Jangka Panjang		613.560.766.214,00	480.841.387.576,68
39				
40	ASET TETAP	G.5.3.1.3		
41	Tanah	G.5.3.1.3.1	4.662.740.305.933,24	3.712.437.958.608,24
42	Peralatan dan Mesin	G.5.3.1.3.2	1.350.142.932.924,33	1.169.973.841.821,87
43	Gedung dan Bangunan	G.5.3.1.3.3	2.189.492.055.100,79	1.947.618.582.546,85
44	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	G.5.3.1.3.4	5.532.561.482.634,28	4.675.527.618.788,52
45	Aset Tetap Lainnya	G.5.3.1.3.5	132.455.766.484,08	118.063.012.530,06
46	Konstruksi dalam Pengerjaan	G.5.3.1.3.6	51.192.100.038,70	78.667.885.166,70
47	Akumulasi Penyusutan	G.5.3.1.3.7	(3.901.677.424.586,00)	(3.410.972.699.503,62)
48	Jumlah Aset Tetap		10.016.907.218.529,40	8.291.316.199.958,62

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2019	2018
49				
50	DANA CADANGAN	G.5.3.1.4		
51	Dana Cadangan	G.5.3.1.4.1	-	-
52	Jumlah Dana Cadangan		-	-
53				
54	ASET LAINNYA	G.5.3.1.5		
55	Tuntutan Ganti Rugi	G.5.3.1.5.1	-	-
56	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	G.5.3.1.5.1.1	-	-
57	Tuntutan Ganti Rugi Neto	G.5.3.1.5.1.2	-	-
58	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	G.5.3.1.5.2	112.406.440.000,00	112.406.440.000,00
59	Aset Tak Berwujud.	G.5.3.1.5.3	11.467.126.430,00	9.198.595.430,00
60	Amortisasi Aset Tak Berwujud	G.5.3.1.5.3.1	(9.985.942.930,00)	(8.085.468.217,60)
61	Aset Tak Berwujud Neto	G.5.3.1.5.3.2	1.481.183.500,00	1.113.127.212,40
62	Aset Lain-lain (Neto)	G.5.3.1.5.4	63.239.545.496,63	21.297.405.989,24
63	Jumlah Aset Lainnya		177.127.168.996,63	134.816.973.201,64
64				
65	JUMLAH ASET		12.066.798.550.548,30	10.190.832.640.978,70
66				
69	KEWAJIBAN	G.5.3.2		
70				
71	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	G.5.3.2.1		
72	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	G.5.3.2.1.1	-	2.092.600,00
73	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Pendek	G.5.3.2.1.2	9.407.238.840,89	4.868.280.337,34
74	Utang Belanja	G.5.3.2.1.3	27.432.655.306,67	2.132.872.932,00
75	Utang Kelebihan Transfer Dana Bagi Hasil	G.5.3.2.1.4	827.815.869,00	827.815.869,00
76	Utang Jangka Pendek Lainnya	G.5.3.2.1.5	9.614.627.832,06	11.461.839.149,68
77	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		47.282.337.848,62	19.292.900.888,02
78				
79	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	G.5.3.2.2		
80	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang	G.5.3.2.2.1	196.447.032,84	316.412.152,79
81	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		196.447.032,84	316.412.152,79
82				
83	JUMLAH KEWAJIBAN		47.478.784.881,46	19.609.313.040,81
84				
85	EKUITAS	G.5.3.3		
86	EKUITAS			
87	Ekuitas		12.019.319.765.666,80	10.171.223.327.937,90
88	JUMLAH EKUITAS		12.019.319.765.666,80	10.171.223.327.937,90
89				
90	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.066.798.550.548,30	10.190.832.640.978,70

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI



PEMERINTAH KOTA DEPOK
LAPORAN ARUS KAS (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018
1	2	3
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	1.018.129.612.075,00	839.491.835.275,00
Penerimaan Retribusi Daerah	40.835.247.582,00	36.388.197.243,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.701.132.428,00	12.681.414.156,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	212.337.776.952,00	170.726.434.019,72
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59.334.129.615,00	78.494.670.284,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	24.159.177.895,00	23.969.468.586,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	950.369.136.000,00	860.675.991.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	193.686.735.455,00	195.519.453.727,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	10.232.668.000,00	78.250.000.000,00
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	521.083.965.142,00	478.502.251.409,00
Penerimaan Hibah	125.715.328.821,00	123.280.664.379,00
Penerimaan Lainnya	58.692.896.427,00	41.873.707.000,00
Penerimaan Dari Pendapatan Luar Biasa		
Jumlah Arus Kas Masuk	3.236.277.806.392,00	2.939.854.087.078,72
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	1.340.183.748.820,00	1.208.917.104.596,00
Pembayaran Barang dan Jasa	808.848.131.967,00	667.414.873.943,00
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	110.781.723.850,00	76.046.094.500,00
Pembayaran Bantuan Sosial	43.816.998.700,00	41.311.378.500,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	1.379.235.916,00	1.171.491.250,00
Pembayaran Tidak Terduga	168.162.500,00	169.171.831,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		
Jumlah Arus Kas Keluar	2.305.178.001.753,00	1.995.030.114.620,00
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</i>	<i>931.099.804.639,00</i>	<i>944.823.972.458,72</i>
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualan Atas Tanah		
Penjualan Atas Peralatan Mesin		253.800.000,00
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan		158.600.000,00
Penjualan Atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		
Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya		
Pendapatan Dari Penjualan Aset Lainnya		
Jumlah Arus Kas Masuk	-	412.400.000,00

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018
1	2	3
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	96.852.947.280,00	43.784.742.200,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	133.260.162.515,00	142.371.807.419,60
Perolehan Gedung dan Bangunan	323.537.239.086,00	187.998.590.951,55
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	336.932.318.556,00	352.608.471.480,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	35.506.706.889,00	43.290.181.148,00
Perolehan Aset Lainnya		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	100.000.000.000,00	128.636.652.029,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.026.089.374.326,00	898.690.445.228,15
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</i>	<i>(1.026.089.374.326,00)</i>	<i>(898.278.045.228,15)</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	209.363.127.942,84	183.929.227.471,31
Jumlah Arus Kas Masuk	209.363.127.942,84	183.929.227.471,31
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	209.365.220.542,84	183.969.323.063,31
Jumlah Arus Kas Keluar	209.365.220.542,84	183.969.323.063,31
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris</i>	<i>(2.092.600,00)</i>	<i>(40.095.592,00)</i>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(94.991.662.287,00)	46.505.831.638,57
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	765.647.579.351,55	719.141.747.712,98
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	670.655.917.064,55	765.647.579.351,55
Kas di Kasda	632.702.881.248,55	290.241.510.246,55
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	23.173.498,00	400.394.130,00
Saldo Akhir Kas Bendahara Penerimaan	21.967.400,00	4.075.500,00
Saldo Kas BLUD	32.265.015.809,00	44.888.880.585,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	576.872,00	4.467.813,00
Saldo Kas Lainnya	5.642.302.237,00	108.251.077,00
Saldo Setara Kas - Deposito	-	430.000.000.000,00
Saldo Akhir Kas	670.655.917.064,55	765.647.579.351,55

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KOTA DEPOK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I PENDAHULUAN

G.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang penting yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, untuk menilai kondisi keuangan, untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2019 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bukan hanya untuk kalangan aparatur Pemerintah Kota Depok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, tetapi juga masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagai *stake holder* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Depok merupakan entitas pelaporan yang mempunyai kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja.

Laporan keuangan merupakan salah satu tindakan nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk memberikan penjelasan dan menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca laporan keuangan maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan informasi, penjelasan, daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Selain itu, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode, yang menggambarkan kinerja keuangan dari Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota dalam melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan.

Penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Depok pada Tahun 2019 telah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu menggunakan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual. Pengelolaan keuangan yang baik diharapkan dapat sejalan dan menjadi stimulus dalam meraih keberhasilan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, yang dalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholder pemerintah daerah, baik dari jajaran aparatur pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta warga masyarakat pada umumnya. Sinergi dari seluruh stakeholder ini, pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang profesional, kemandirian ekonomi masyarakat, infrastruktur dan lingkungan yang nyaman, serta sumber daya manusia yang unggul, kreatif dan religius.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Depok.

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1.	Pajak Hotel	2019	23.438.433,00	19.353.669.191,00	19.334.983.691,00	42.123.933,00
2.	Pajak Restoran	2019	696.873.199,50	203.646.212.917,00	202.743.727.278,00	1.599.358.838,50
3.	Pajak Hiburan	2019	62.011.033,00	29.622.702.489,00	29.611.945.201,00	72.768.321,00
4.	Pajak Parkir	2019	50.644.900,00	16.273.918.658,00	16.224.074.558,00	100.489.000,00
5.	Pajak Reklame	2019	351.662.701,00	20.178.874.678,00	20.006.780.752,00	523.756.627,00
6.	Pajak Air Bawah Tanah	2019	186.854.807,60	10.948.561.757,00	5.974.950.385,00	5.160.466.179,60
7.	PBB	2019	570.051.006.176,85	410.055.774.112,00	295.918.058.192,00	684.188.722.096,85
8.	BPHTB	2019	4.272.809.771,00	328.074.163.359,00	327.390.613.406,00	4.956.359.724,00
	Jumlah		575.695.301.021,95	1.038.153.877.161,00	917.205.133.463,00	696.644.044.719,95

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Penyisihan Piutang	Saldo Akhir Penyisihan Piutang
1	2	3	4	5
1.	Pajak Hotel	2018	2.562.412,37	4.204.029,81
2.	Pajak Restoran	2018	166.369.231,55	196.598.345,50
3.	Pajak Hiburan	2018	22.684.426,42	23.836.539,49
4.	Pajak Parkir	2018	10.937.342,00	12.257.095,00
5.	Pajak Reklame	2018	103.462.024,74	125.497.569,38
6.	Pajak Air Bawah Tanah	2018	89.901.661,48	130.808.573,54
7.	PBB	2018	141.889.440.077,89	195.431.532.692,74
8.	BPHTB	2018	2.113.266.243,46	3.266.579.946,43
	Jumlah		144.398.623.419,89	199.191.314.791,87

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI

Lampiran X
Nomor : 5 TAHUN 2020
Tanggal : 3 November 2020

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian	Tahun Pengakuan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
			Nihil			
		Jumlah	-	-	-	-

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI

PEMERINTAH KOTA DEPOK
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 6-9	11	12	13 = 9-12
1	<2000											37.947.160,00
	2000	Bank Jabar	Perda Kota Depok No. 11 Tahun 2003	Saham	107.544.950,00	107.544.950,00		107.544.950,00	-	9.894.385,00		107.544.950,00
	2001	Bank Jabar	tentang Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga	Saham	500.000.000,00	500.000.000,00		500.000.000,00	-	52.610.364,00		500.000.000,00
	2002	Bank Jabar		Saham	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00		1.750.000.000,00	-	294.811.617,07		1.750.000.000,00
	2003	Bank Jabar		Saham	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		1.500.000.000,00	-	629.149.146,00		1.500.000.000,00
	2004	Bank Jabar		Saham	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	-	873.920.111,00		2.000.000.000,00
	2005	Bank Jabar		Saham	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	-	1.275.749.152,00		1.000.000.000,00
	2006	Bank Jabar		Saham	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	-	1.627.750.359,00		5.000.000.000,00
	2007	Bank Jabar		Saham	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	-	2.656.353.155,00		2.000.000.000,00
	2008	Bank Jabar		Saham	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	-	3.422.719.115,00		1.000.000.000,00
	2009	Bank Jabar		Saham	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00		7.500.000.000,00	-	5.771.018.714,00		7.500.000.000,00
	2010	Bank Jabar		Saham				-	-	5.345.662.646,00		-
	2011	Bank Jabar		Saham				-	-	5.470.961.595,00		-
	2012	Bank Jabar		Saham				-	-	6.133.113.878,00		-
	2013	Bank Jabar		Saham				-	-	6.996.351.701,00		-
	2014	Bank Jabar		Saham				-	-	6.414.068.909,00		-
	2015	Bank Jabar		Saham				-	-	7.596.550.886,00		-
	2016	Bank Jabar		Saham				-	-	7.972.795.152,00		-
	2017	Bank Jabar		Saham				-	-	8.089.251.710,00		-
	2018	Bank Jabar		Saham	7.971.837.600,00	7.971.837.600,00		7.971.837.600,00	-	8.383.723.877,00		7.971.837.600,00
	2019	Bank Jabar		Saham	-		-	-	-			-
J U M L A H					30.329.382.550,00	30.329.382.550,00	-	30.329.382.550,00	-	79.016.456.472,07	-	30.367.329.710,00

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 6-9	11	12	13 = 9-12

3	2012	PDAM	Perda Kota Depok No. 14 Tahun 2012		600.000.000,00	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	-	-	600.000.000,00
	2013	PDAM	tentang Penyertaan Modal Pemerintah		10.200.000.000,00	10.200.000.000,00	-	10.200.000.000,00	-	-	-	10.200.000.000,00
	2014	PDAM	Kota Depok kepada PDAM Kota Depok		12.350.000.000,00	12.350.000.000,00	-	12.350.000.000,00	-	-	-	12.350.000.000,00
	2015	PDAM			14.700.000.000,00	14.700.000.000,00	-	14.700.000.000,00	-	-	-	14.700.000.000,00
	2016	PDAM			125.000.000.000,00	125.000.000.000,00	-	125.000.000.000,00	-	-	-	125.000.000.000,00
	2017	PDAM			100.000.000.000,00	100.000.000.000,00		100.000.000.000,00		4.592.162.446,00		100.000.000.000,00
	2018	PDAM			100.000.000.000,00	100.000.000.000,00		100.000.000.000,00		13.317.408.551,00		100.000.000.000,00
	2019	PDAM			100.000.000.000,00		100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00			100.000.000.000,00
JUMLAH					462.850.000.000,00	362.850.000.000,00	100.000.000.000,00	462.850.000.000,00	-	17.909.570.997,00	-	462.850.000.000,00

TTD

DEDI SUPANDI

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DAFTAR REKAPITULASI PENAMBAH PENGURANG ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian Aset Tetap	Saldo Awal Aset Tetap	Penambahan Aset Tetap	Pengurangan Aset Tetap	Saldo Akhir Aset Tetap
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	Tanah	3.712.437.958.608,24	2.280.884.534.093,00	1.330.582.186.768,00	4.662.740.305.933,24
2.	Peralatan dan Mesin	1.169.973.841.821,87	149.636.376.925,61	(30.532.714.176,85)	1.350.142.932.924,33
3.	Gedung dan Bangunan	1.947.618.582.546,85	646.576.509.099,17	404.703.036.545,23	2.189.492.055.100,79
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.675.527.618.788,52	1.795.367.254.274,00	938.333.390.428,24	5.532.561.482.634,28
5.	Aset Tetap Lainnya	118.063.012.530,06	37.001.048.379,00	22.608.294.424,98	132.455.766.484,08
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	78.667.885.166,70	(18.239.531.000,00)	9.236.254.128,00	51.192.100.038,70
7.	Akumulasi Penyusutan	(3.410.972.699.503,62)	(490.704.725.082,38)	-	(3.901.677.424.586,00)
	Jumlah	8.291.316.199.958,62	4.400.521.466.688,40	2.674.930.448.117,60	10.016.907.218.529,40

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI

Lampiran XIII
Nomor : 5 TAHUN 2020
Tanggal : 3 November 2020

**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Uraian Aset Tetap	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4
1.	Tanah	3.712.437.958.608,24	4.662.740.305.933,24
2.	Peralatan dan Mesin	1.169.973.841.821,86	1.350.142.932.924,33
3.	Gedung dan Bangunan	1.947.618.582.546,85	2.189.492.055.100,79
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.675.527.618.788,52	5.532.561.482.634,28
5.	Aset Tetap Lainnya	118.063.012.530,06	132.455.766.484,08
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	78.667.885.166,70	51.192.100.038,70
	Jumlah	11.702.288.899.462,20	13.918.584.643.115,40

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian	Nilai	SKPD
1	2	3	
1.	Penataan Daerah Aliran Sungai Kecamatan Bojongsari (Penurapan Kali Angke kel. Pondok Petir)	245.104.049,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penataan Daerah Aliran Sungai Kecamatan Sawangan (Penurapan Kali Caringin)	341.241.235,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rehabilitasi Normalisasi dan Penurapan Penanggulan Saluran Irigasi Kecamatan Bojongsari (Penanganan Longsor SDN Pondok Petir 3)	156.374.724,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Rehabilitas dan penataan Lingkungan Stadion Sukatani	1.419.781.350,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Rehabilitas dan penataan Lingkungan Gedung Balai Rakyat Mekarsari	2.177.967.692,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Rehabilitas dan penataan Lingkungan SDN Depok 1	3.386.953.292,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Pembangunan Gedung Penyimpanan Barang Sitaan Kejaksaan Negeri Kota Depok	566.676.650,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Pembangunan Gedung Pramuka	4.844.249.246,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Pembangunan Kantor Kecamatan Sukmajaya	6.454.261.273,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Pembangunan Kantor Kecamatan Sawangan	6.046.268.958,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Pembangunan Kantor Kelurahan Cinangka	3.416.912.800,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Pembangunan dan Penataan Lingkungan gedung GOR	19.215.971.235,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Pembangunan dan Penataan Lingkungan Puskesmas Jatijajar	2.660.554.939,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
3	Pembangunan Saluran, Pagar Keliling dan Penataan Area Pasar Cisalak	259.782.595,70	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Jumlah	51.192.100.038,70	

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian Aset Lainnya	Saldo Awal Tahun	Saldo Akhir Tahun
1	2	3	4
1.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-
2.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	112.406.440.000,00	112.406.440.000,00
3.	Aset Tak Berwujud.	9.198.595.430,00	11.467.126.430,00
	Akumulasi Amortisasi	(8.085.468.217,60)	(9.985.942.930,00)
4.	Aset Lain-lain	2.756.330.998,41	2.756.330.998,41
5.	Detail Engineering Desain (DED)	18.375.809.485,00	27.319.033.875,00
6.	Barang Rusak Berat	25.093.053.939,83	85.716.480.909,13
	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(24.927.788.434,00)	(52.552.300.285,91)
	Jumlah	134.816.973.201,64	177.127.168.996,63

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI

**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN (Rp)	SALDO AWAL (Rp)	TRANSFER DARI KAS DAERAH (Rp)	TRANSFER KE KAS DAERAH (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
J U M L A H			-	-	-	-	-	-

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DAFTAR REKAPITULASI KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian	Nilai
1	2	3
1.	Hutang Pajak	-
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	9.407.238.840,89
3.	Hutang Belanja Barang dan Jasa	7.601.205.863,00
4.	Hutang Belanja Modal Tanah	74.700.000,00
5.	Hutang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.978.436,00
6.	Hutang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.109.564.486,67
7.	Hutang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.539.206.521,00
8.	Hutang Jangka Pendek Listrik+Air+Telp	1.594.246.312,00
9.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	8.020.381.520,06
10.	Hutang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	827.815.869,00
	Jumlah	47.282.337.848,62

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI

Lampiran XVIII

Nomor : 5 TAHUN 2020

Tanggal : 3 November 2020

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DAFTAR REKAPITULASI KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Uraian	Nilai
1	2	3
1.	Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang (Retribusi TPU)	196.447.032,84
2.	Hutang Jangka Panjang Lainnya	-
	Jumlah	196.447.032,84

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KODE	JUDUL KEGIATAN	JUMLAH REALISASI TAHUN 2017, TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019			JUMLAH AKUMULASI REALISASI S.D. AKHIR TAHUN 2019	JUMLAH YANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUTNYA
			REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	REALISASI TAHUN 2019		
1	2	3	4	5	6	7 = (4+5+6)	8
JUMLAH			-	-	-	-	-

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI

LAMPIRAN XX

Nomor : 5 TAHUN 2020

Tanggal : 3 November 2020

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

No.	Badan Usaha Milik Daerah	Laporan Keuangan	Keterangan
1	PT. PRADAS	Lampiran A	Terakhir Aktif Tahun 2009
2	PDAM TIRTA ASASTA	Lampiran B	

Pjs. WALI KOTA DEPOK

TTD

DEDI SUPANDI